

Urbanisasi Dan Pengurangan Kemiskinan Di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan

S. Febrianto¹, J. A. Syahbana²

^{1,2} Universitas Diponegoro, Indonesia

Article Info:

Received: 10 January 2016

Accepted: 12 January 2016

Available Online: 11 July 2017

Keywords:

Urbanisasi, Pengurangan
Kemiskinan, Wilayah Eks
Karesidenan Pekalongan

Corresponding Author:

S. Febrianto

Diponegoro University,
Semarang, Indonesia

Email:

slametfebrianto42@gmail.com

Abstract: *Urbanisasi yang terjadi jelas akan memberikan implikasi yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat yang mengalaminya. Satu diantara dampak negatif yang muncul adalah konsentrasi sumber daya pada kawasan potensial (perkotaan) sehingga pada akhirnya berdampak pada adanya diferensiasi pendapatan. Urbanisasi yang telah berjalan begitu cepatnya di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan telah memberikan begitu banyak kemajuan terlihat dari keberadaan 2 kawasan perkotaan yaitu Kota Tegal dan Pekalongan. Namun di sisi lain angka kemiskinan belum juga berkurang secara signifikan. Penelitian ini menggunakan data selama 10 tahun sejak tahun 2000 hingga 2010. Setelah dilakukan analisis akhirnya menghasilkan suatu temuan, yaitu kabupaten atau kota yang memiliki tingkat urbanisasi tinggi, ternyata memiliki tingkat pengurangan kemiskinan yang rendah, yaitu pada Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Sebaliknya kondisi berbeda terjadi di daerah dengan tingkat urbanisasi di bawah kedua perkotaan tersebut seperti Kabupaten Tegal, Pekalongan dan Brebes. Walaupun memiliki tingkat urbanisasi lebih rendah, namun pengurangan kemiskinan yang terjadi jauh lebih baik dibandingkan kedua kota tersebut. Hasil temuan ini menjelaskan bahwa urbanisasi di kawasan perkotaan belum mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan.*

Copyright © 2016 JTPWK-UNDIP

This open access article is distributed under a

Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

Febrianto, S. & Syahbana, J. A. (2016). Urbanisasi Dan Pengurangan Kemiskinan Di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, vol 5 (1), 2016, 51-57

1. PENDAHULUAN

Urbanisasi adalah suatu fenomena yang paling berpengaruh dalam isu – isu demografi di Negara – Negara dengan pendapatan rendah hingga menengah (Naylor & Falcon, 2000). Suatu Negara yang berkembang akan mengalami restrukturisasi mulai dari meninggalkan sektor pertanian dan memulai proses urbanisasi (Christiaensen & Todo, 2014). Secara universal, urbanisasi dipandang sebagai indikasi langsung dari modernisasi, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi (Potter & Lloyd-Evans, 1998). Pada Negara – Negara berkembang atau yang biasa disebut sebagai Negara dunia ketiga, urbanisasi merupakan wujud nyata dari terjadinya pertumbuhan ekonomi dan modernisasi. Negara – Negara tersebut akan mulai meninggalkan sektor pertanian kemudian bergerak menuju sektor industri karena masuknya teknologi dan investasi.

Urbanisasi adalah fenomena yang diumpamakan seperti proses meledaknya suatu kota (Qadeer, 2004). *Urbanization is a process becoming urban* (Yunus 2006). Kota – kota akan berkembang dengan populasi yang terus meningkat, kemudian menyebar hingga daerah pinggiran hingga akhirnya menelan kawasan pedesaan dan pertanian menjadi wilayahnya seperti yang terjadi India, Bangladesh, Pakistan, China, Indonesia, Mesir dan Negara dunia ketiga lainnya.

Dibandingkan dengan abad – abad sebelumnya, dalam abad ke 20 terutama setelah Perang Dunia II jumlah kota di seluruh dunia bertambah pesat. Hal ini sebagai akibat dari meluasnya jaringan transportasi baik di Negara maju maupun Negara berkembang (Daldjoeni, 1996). Di Asia kota – kota merupakan penghubung dunia barat dan dunia Timur. kota dijadikan tempat dimana gagasan baru muncul. Urbanisasi di Asia Tenggara jika dibandingkan dengan bagian – bagian dunia lainnya sejatinya tidak begitu tinggi. Pada tahun 1970 hanya sekitar 20% dari total penduduknya yang berdiam di kota, sedangkan 12% tinggal di kota – kota dengan penduduk lebih dari 100.000 jiwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sekitar 80% penduduk di Asia Tenggara masih digolongkan penduduk rural (Ravallion, 2001).

Urbanisasi adalah hasil dari proses yang terjadi secara sosial, ekonomi dan demografi yang mengkonsentrasikan populasi di suatu lokasi, mengubah bentuk tutupan lahan, mengubah struktur ekonomi dengan terjadinya industrialisasi serta mengubah kehidupan dan hubungan sosial (Brandful, Erdiaw-kwasie, & Amoateng, 2014). Terlihat jelas bahwa urbanisasi sendiri merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan bersifat multi-sektoral sehingga keberadaannya sendiri dapat mempengaruhi berbagai sektor.

Urbanisasi berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Urbanisasi akan muncul bersamaan dengan modernisasi yang dibawa oleh pertumbuhan ekonomi (Njoh, 2003). Pertumbuhan ekonomi jelas menjadi kerangka utama yang menjadi penggerak terjadinya urbanisasi (Knox, 1994). Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya cenderung mendukung wilayah – wilayah tertentu. wilayah atau kota tertentu lebih mampu menarik aktivitas ekonomi dan penduduk daripada wilayah lainnya (Gilbert and Gugler 1996:23). Di seluruh negara dunia ketiga, terdapat kecenderungan yang jelas akan konsentrasi sektor perindustrian, perdagangan dan sektor lainnya di wilayah tertentu. Dengan demikian penduduk akan terpusat secara spasial (konsentrasi spasial) dan membentuk kawasan perkotaan. Pertumbuhan ekonomi kadang menolong masyarakat miskin, tapi banyak kasus yang menunjukkan hal sebaliknya (Donaldson, 2008).

Proses konsentrasi spasial (urbanisasi) dan perubahan ekonomi pedesaan menuju ekonomi perkotaan (pertumbuhan ekonomi) ini mengakibatkan menguatnya differensiasi pendapatan dan kesejahteraan daerah. Differensiasi pendapatan tersebut akan berujung pada ketimpangan (disparitas) antar wilayah. Efek spasial yang akan muncul dari meningkatnya disparitas tersebut dapat memiskinkan wilayah – wilayah yang dasarnya miskin karena seluruh sumber daya akan semakin tertarik ke wilayah potensial (Gilbert and Gugler 1996:24). Dalam pertumbuhan sebaiknya tidak dibarengi dengan ketimpangan. Begitu halnya dengan urbanisasi. Urbanisasi diharapkan mampu memberikan kemajuan dan pertumbuhan bagi kawasan – kawasan yang diidentifikasi sebagai kawasan pedesaan. Urbanisasi diharapkan mampu membuka peluang bagi kawasan pedesaan untuk mengurangi kemiskinannya.

Indonesia sebagai negara terbesar ketiga diantara negara berkembang, namun efek dari pertumbuhan ekonomi sangat jarang berdampak pada masyarakat miskin (Bhattacharyya & Resosudarmo, 2014). Wilayah yang memiliki tingkat urbanisasi paling cepat di Indonesia adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa sebagai pulau utama dan menjadi pusat ekonomi dan pemerintahan membuat pulau ini tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan pulau – pulau lainnya seperti Sumatra dan Sulawesi, sementara Kalimantan dan Papua cenderung lebih tertinggal. Urbanisasi yang begitu cepat terjadi di Pulau Jawa jelas dipicu oleh keberadaan jalur transportasi yang membuat seluruh wilayahnya dapat diakses. Keberadaan akses ini membuat arus informasi dan pergerakan berjalan dengan cepat.

Jalur transportasi juga membuat perbedaan dari tingkat urbanisasi yang terjadi di Pulau Jawa. Keberadaan jalur pantura yang menjadi jalur utama transportasi di Pulau Jawa membuat kawasan pesisir utara berkembang jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan pesisir selatan. Urbanisasi yang membawa serta modernisasi dan investasi memberikan dampak yang begitu besar. Terbukanya lapangan kerja baru, berkembangnya industri, bertambahnya pendapatan, pertumbuhan ekonomi menjadi wujud nyata dari urbanisasi yang terus terjadi di kawasan pantura, namun di sisi lain juga terdapat dampak negatif yang ditimbulkan, diantaranya adalah kerusakan lingkungan karena limbah industri, munculnya permukiman kumuh, dan terdapat konsentrasi sumber daya di kota – kota besar sehingga berujung pada kemiskinan yang tidak menurun secara signifikan dan cenderung bertambah.

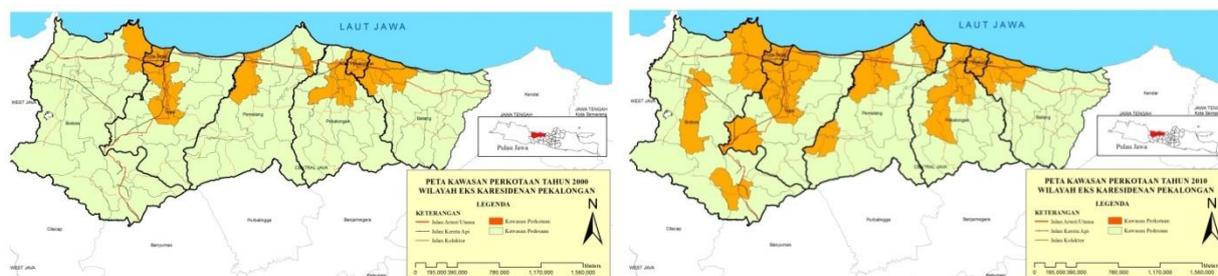
2. DATA DAN METODE

Penelitian Penelitian ini menggunakan data skunder sebagai data yang akan diolah untuk menguji hipotesis dan memperoleh hasil. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber – sumber tertentu yang berwenang dan kredibel untuk mengeluarkan data tersebut. Dengan demikian data yang digunakan adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek namun melalui perantara (instansi pemerintah atau literatur). Pendekatan penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian hipotesis terhadap keadaan nyata di lapangan sehingga teruji kebenaran teori yang digunakan. Dalam menjelaskan keadaan nyata dibutuhkan informasi berdasarkan data – data yang akan dianalisis menggunakan teknik analisis tertentu. Analisis yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan teknik skoring dan pembuatan tipologi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urbanisasi dan pengurangan kemiskinan dalam kerangka kewilayahan pastinya saling berkaitan satu sama lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu perlu adanya suatu pengelompokan kedua fenomena tersebut yang ada di masing – masing kabupaten/kota. Pengelompokan ini sangat penting karena dapat memperlihatkan dan membandingkan secara menyeluruh kondisi urbanisasi dan pengurangan kemiskinan yang ada di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan.

Gambar 1. Pertumbuhan Kawasan Perkotaan tahun 2000 - 2010



Dari gambar 1 dapat terlihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada kawasan perkotaan di tahun 2000 dan tahun 2010. Pada tahun 2000 kawasan perkotaan pada awalnya hanya muncul di sekitar kawasan perkotaan utama yaitu Kota Pekalongan dan Kota Tegal, sementara itu hanya ada 2 kawasan perkotaan yang jaraknya juga cukup dekat yaitu di Kecamatan Comal dan Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Namun setelah 10 tahun berlalu, muncul kawasan perkotaan baru di kecamatan – kecamatan lainnya. Namun terdapat kecenderungan bahwa kawasan perkotaan yang terbentuk merupakan perluasan dari kawasan perkotaan yang sudah lama ada, yaitu tetap terletak disekitar Kota Pekalongan atau Kota Tegal. Di sisi lain, wilayah – wilayah di bagian selatan tetap menjadi wilayah dengan status desa, kecuali bagian selatan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal yang muncul kawasan perkotaan karena didukung oleh keberadaan jalur utama dari Pantura menuju Kabupaten Banyumas dan Cilacap.

Kondisi ini juga menjelaskan pendapat yang disampaikan oleh Gilbert dan Gugler (1996) yang menjelaskan bahwa dalam urbanisasi terjadi pemusatan sumber daya. Pemusatan sumber daya yang terjadi di Eks Karesidenan Pekalongan terlihat dari perubahan status kekotaan yang mayoritas terjadi di sekitar kawasan perkotaan utama yaitu Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Pemusatan sumber daya ini juga mengakibatkan terbentuknya suatu kawasan perkotaan dengan induk utama kedua kota tersebut. Dari penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa telah terjadi proses urbanisasi di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, dimana dimana kabupaten – kabupaten yang wilayahnya terletak dekat dengan Kota Pekalongan dan Kota Tegal mengalami urbanisasi yang lebih cepat dan lebih luas jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten lainnya.

Pengurangan Kemiskinan, Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan adalah daerah yang sangat strategis karena letaknya di jalur pantura, namun masih merupakan kantong kemiskinan yang ada di Jawa Tengah.

Jumlah kemiskinan terbesar terletak di Kabupaten Brebes yang pada tahun 2013, kemiskinannya mencapai 324.291 jiwa atau mencapai 23% dari keseluruhan penduduknya. Disusul oleh kabupaten Pemalang yang proporsi penduduk miskinnya mencapai 20% dari keseluruhan penduduknya. Berbeda dengan kawasan Perkotaan seperti Kota Pekalongan dan Kota Tegal, kedua kota tersebut memiliki tingkat proporsi kemiskinan rata – rata 10% dengan jumlah dibawah 30.000 jiwa. Dapat terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kemiskinan yang ada di kawasan pedesaan dan yang ada di kawasan perkotaan. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1. Kemiskinan 2000 – 2010

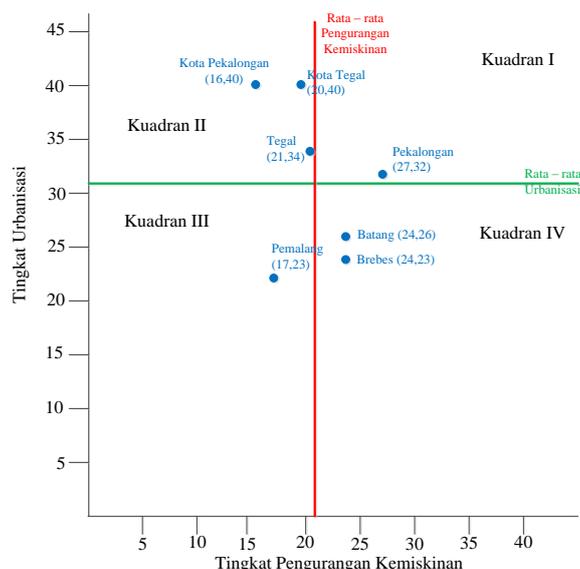
Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin			Proporsi Penduduk Miskin		
	2000	2005	2010	2000	2005	2010
Batang	155,034	125,396	103,402	23.73%	18.18%	14.56%
Pekalongan	215,378	170,312	136,659	27.81%	19.21%	14.00%
Kota Pekalongan	26,341	17,508	26,412	10.58%	6.60%	9.14%
Pemalang	330,785	300,201	251,943	26.37%	23.25%	19.78%
Tegal	313,402	279,463	182,590	22.40%	19.00%	13.05%
Kota Tegal	31,743	21,711	25,740	13.48%	8.85%	10.70%
Brebes	576,782	488,674	398,819	33.89%	28.28%	22.97%

Tabel diatas memperlihatkan bahwa kemiskinan paling parah terjadi di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang. Jika dikaitkan dengan kondisi perekonomiannya, kedua kabupaten ini pada dasarnya sama – sama merupakan kabupaten yang memiliki basis sektor ekonomi primer, yaitu pertanian ataupun pertambangan. Disisi lain, kawasan perkotaan seperti Kota Tegal dan Kota Pekalongan, serta daerah disekitarnya seperti Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pekalongan sendiri memiliki angka kemiskinan yang relatif kecil dari segi proporsi, yaitu hanya sekitar 13,5%.

Selain itu tabel diatas memperlihatkan bahwa 3 dari 7 kabupaten/kota yang ada di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, yang berada diatas angka 150.000 jiwa. Hal ini memperlihatkan bahwa ketiga kabupaten tersebut merupakan kantong – kantong kemiskinan yang berada di wilayah tersebut.

Dari data – data diatas kemudian akan dilakukan analisis, instrumen yang digunakan sebagai alat analisis adalah matriks urbanisasi dan pengurangan kemiskinan. Pada matriks ini kedua variabel ini akan dituangkan dalam matriks sehingga dapat diketahui pengelompokan fenomena yang terjadi di masing – masing kabupaten/kota. Matriks di Gambar 1 dapat memperlihatkan karakteristik urbanisasi dan kemiskinan yang ada di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan. Matriks tersebut dibagi menjadi 4 kuadran, yang dibagi berdasarkan skor rata – rata urbanisasi dan pengurangan kemiskinan. Dengan demikian akan lebih terlihat karakteristik urbanisasi dan kemiskinan yang ada di masing – masing kabupaten/kota. Kuadran I hanya berisi satu kabupaten yaitu Kabupaten Pekalongan. Hal ini memperlihatkan bahwa baik urbanisasi dan pengurangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Pekalongan berada di atas rata – rata Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan. Fakta ini menunjukkan bahwa urbanisasi dan pengurangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Pekalongan dapat berjalan beriringan.

Gambar 2. Tipologi Urbanisasi dan Pengurangan Kemiskinan



Kemudian pada kuadran II, dapat terlihat bahwa terdapat Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kota Pekalongan. Pada kuadran ini, urbanisasi berjalan cepat atau diatas rata – rata, namun pengurangan kemiskinannya berada di bawah rata – rata. Hal ini memperlihatkan bahwa urbanisasi dan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang ada belum mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan. Permasalahan kemiskinan bukan terletak pada lambatnya pertumbuhan atau kemajuan wilayahnya. Terdapat indikasi yang perlu ditelaah lebih lanjut bahwa kemiskinan yang ada disebabkan oleh ketidakmerataan pembangunan yang berjalan sehingga terjadi disparitas pendapatan diantara penduduknya.

Selanjutnya pada kuadran III terdapat Kabupaten Pemalang. Kabupaten ini dapat dianggap sebagai kabupaten dengan perkembangan paling lambat atau di bawah rata – rata dibawah kabupaten/kota lainnya. Kabupaten ini memiliki tingkat urbanisasi di bawah rata – rata dan pengurangan kemiskinan yang juga di bawah rata – rata. Dengan perekonomian yang belum mampu berkembang, kemudian pembangunan yang belum berdampak maksimal, maka kemiskinan akan terus menjadi permasalahan. Permasalahan kabupaten di Kuadran III ini menjadi lebih kompleks karena selain karena daerahnya belum berkembang, kinerja pengurangan kemiskinannya pun cenderung lambat.

Yang terakhir adalah Kuadran IV. Pada kuadran ini terdapat dua kabupaten yaitu Kabupaten Batang dan Kabupaten Brebes. Kedua kabupaten ini memiliki skor urbanisasi di bawah rata – rata, namun dari segi pengurangan kemiskinan memiliki skor diatas rata – rata. Secara keseluruhan dapat terlihat bahwa kinerja pengurangan kemiskinan di kedua kabupaten ini cukup baik walau belum ditopang oleh keberadaan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang secara keseluruhan cenderung di bawah rata – rata. Dari matriks ini diindikasikan bahwa jika pertumbuhan ekonomi dan pembangunannya ditingkatkan maka akan mempercepat pengurangan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. Perbandingan Aspek Utama Urbanisasi dan Pengurangan Kemiskinan

Kabupaten	Aspek Utama Pemicu Urbanisasi	Tingkat Pengurangan Kemiskinan
Batang	Fisik, Sosial	Tinggi
Pekalongan	Fisik, Ekonomi, sosial	Sangat tinggi
Kota Pekalongan	Ekonomi, sosial	Rendah
Pemalang	Sosial	Rendah
Tegal	Fisik, Ekonomi, Sosial	Tinggi
Kota Tegal	Ekonomi, Sosial	Rendah
Brebes	Fisik, Sosial	Tinggi

4. KESIMPULAN

Pada akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa, urbanisasi yang ada di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan pengurangan kemiskinan. keterkaitan keduanya, berjalan dengan suatu hubungan dimana ketika kawasan perkotaan di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, khususnya pada Kota Pekalongan dan Kota Tegal, memiliki tingkat urbanisasi yang begitu cepat namun belum mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan. Berbeda halnya dengan kabupaten lainnya yang memiliki tingkat urbanisasi lebih rendah atau dapat dikatakan urbanisasi berjalan perlahan, malah mampu mengurangi angka kemiskinan cukup signifikan seperti pada Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Jika dilihat dari sudut pandang kewilayahan, maka keterkaitan keduanya adalah anomali. Karena urbanisasi pada dasarnya membawa serta pertumbuhan ekonomi, modernisasi dan perkembangan sosial. Namun jika diperhatikan lebih dalam dan dibandingkan dengan teori yang dikemukakan oleh Gilbert dan Gugler, serta berkaca pada hasil penelitian Buhaug & Urdal, 2013 keseluruhan temuan penelitian yang ada menjadi semakin jelas. Urbanisasi yang berjalan begitu cepat di Kota Pekalongan dan Kota Tegal, tidak mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan karena diikuti oleh meningkatnya risiko ketimpangan sosial yang terjadi. Ketimpangan ini merupakan wujud dari konsentrasi sumber daya yang ada, sehingga dampak dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat, melainkan hanya terpusat di sebagian masyarakat. Namun sebaliknya, pada kabupaten dengan urbanisasi yang berjalan perlahan dan cenderung lambat, risiko ketimpangan menjadi semakin berkurang, atau bisa juga lebih cepat dideteksi sehingga lebih cepat dilakukan pemerataan sehingga tidak terjadi pemusatan sumber daya selama urbanisasi berjalan, dan memungkinkan dampak dari pertumbuhan ekonomi, modernisasi dan pembangunan yang berjalan dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakatnya. Oleh karena itu walaupun temuan secara keseluruhan di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan menunjukkan adanya anomali terhadap teori yang ada, namun jika dilihat lebih mendalam maka akan diketahui bagaimana sebenarnya urbanisasi berdampak pada pengurangan kemiskinan di masing – masing kabupaten/kota.

Pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan merupakan aspek penting dalam pengurangan kemiskinan (Kalwij & Verschoor, 2007).. Begitu halnya dengan urbanisasi. Urbanisasi diharapkan mampu memberikan kemajuan dan pertumbuhan bagi kawasan – kawasan yang diidentifikasi sebagai kawasan pedesaan. Urbanisasi diharapkan mampu membuka peluang bagi kawasan pedesaan untuk mengurangi kemiskinannya. Pengurangan angka kemiskinan dan berkurangnya disparitas (ketimpangan) merupakan tujuan akhir dari pengembangan wilayah (Cameron, 2000). Dengan demikian maka urbanisasi pada dasarnya harus mampu memberikan dampak positif yaitu dengan menjadi jalan bagi masyarakat pedesaan untuk mengentaskan diri dari kemiskinan.

5. REFERENSI

- Bhattacharyya, S., & Resosudarmo, B. P. (2014). Growth , Growth Accelerations , and the Poor : Lessons from Indonesia. *World Development*, 66, 154–165.
- BPS. (2014). *Statistik Nasional Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Brandful, P., Erdiaw-kwasie, M. O., & Amoateng, P. (2014). Rethinking sustainable development within the framework of poverty and urbanisation in developing countries. *Environmental Development*, 13, 18–32.
- Buhaug, H., & Urdal, H. (2013). An urbanization bomb? Population growth and social disorder in cities. *Global Environmental Change*, 23(1), 1–10.
- Cameron, L. A. (2000). Poverty and inequality in Java : examining the impact of the changing age , educational and industrial structure. *Journal of Development Economics*, 62, 149–180.
- Christiaensen, L., & Todo, Y. (2014). Poverty reduction during the rural-urban transformation - The role of the missing middle. *World Development*, 63, 43–58.
- Daldjoeni, N. (1996). *Geografi Kota dan Desa*. Salatiga: Alumni.
- Donaldson, J. a. (2008). Growth is Good for Whom, When, How? Economic Growth and Poverty Reduction in Exceptional Cases. *World Development*, 36(11), 2127–2143.
- Gilbert, A., & Gugler, J. (1996). *Cities, Poverty and Development : Urbanization in Third World*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Kalwij, A., & Verschoor, A. (2007). Not by growth alone: The role of the distribution of income in regional diversity in poverty reduction. *European Economic Review*, 51(4), 805–829.
- Knox, P. L. (1994). *Urbanization : An Introduction to Urban Geography*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.
- Naylor, R. L., & Falcon, W. P. (2000). Is the locus of poverty changing ? *Food Policy*, 9192(95), 501–518.
- Njoh, A. J. (2003). Urbanization and development in sub-Saharan Africa. *Cities*, 20(3), 167–174.
- Potter, R. B., & Lloyd-Evans, S. (1998). *The City in The Developing World*. Essex: Addison Wesley Lingman Limited.
- Qadeer, M. A. (2004). Urbanization by implosion. *Habitat International*, 28, 1–12.
- Ravallion, M. (2001). Growth , Inequality and Poverty : Looking Beyond Averages. *World Development*, 29(11), 1803–1815.
- Yunus, H. S. (2006). *Megapolitan: Konsep, Problematika dan Prospek* (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.